

Judul : Masih Ada Korupsi: Perlu Ada Evaluasi Mental Para Hakim
Tanggal : Kamis, 12 Oktober 2017
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Masih Ada Korupsi Perlu Ada Evaluasi Mental Para Hakim

WAKIL Ketua DPR Fahri Hamzah menganggap, terjalannya Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara (Sulut) Sudiwardono dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK menunjukkan ada yang salah dengan mental hakim. Karena itu, dia menyarankan Mahkamah Agung (MA) mengevaluasi mental para hakim.

"Saya kira, musibah ini, yang kena kepada hakim-hakim ini, adalah akibat keteladoran hakim sendiri. Kalau saya (mengusulkan), evaluasinya itu evaluasi mental hakim," kata.

Menurut Fahri, selama ini DPR sudah mendukung kebijakan MA untuk meningkatkan kesejahteraan hakim. Gaji dan tunjangan hakim sudah dinaikkan. Sayangnya, dukungan itu tidak berpengaruh banyak. Buktinya, masih saja ada hakim yang terjerat kasus korupsi.

"DPR sudah menjaga wibawa hakim luar biasa. Mulai hubungan kerja sampai moratorium yang kami jaga betul, hingga prioritas remunerasi nasional telah diberikan kepada hakim. Tapi, hakimnya tidak menjaga independensi ruang sidang," ucapnya.

Rasa prihatin terhadap kasus Sudiwardono juga disampaikan Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI). Kemarin, para dosen hukum yang tergabung dalam APPTHI menggelar konferensi pers untuk menyikapi kasus tersebut.

Ketua Umum APPTHI Laksanto Utomo menyatakan, sebagai seorang ketua Pengadilan Tinggi, Sudiwardono membawahi beberapa Pengadilan Negeri. Dengan posisi itu, harusnya Sudiwardono mampu menjadi teladan bagi bawahannya dalam menjaga kehormatan institusi peradilan. Namun, yang terjadi malah menerima suap.

Kata Laksanto, bagi seorang

hakim, apalagi seorang pimpinan, berpikir untuk melanggar hukum dan etika saja sudah dilarang, apalagi melakukannya.

"Dengan ditangkapnya Sudiwardono, harus dijadikan momentum oleh MA untuk melakukan evaluasi total mengenai kualitas dan kompetensi SDM (sumber daya manusia) hakim," ujarnya.

Hakim Agung Gayus Lumbuun yang hadir dalam acara itu ikut bersuara. Dia meminta Ketua MA Hatta Ali untuk mundur secara terhormat. Alasannya, telah terjadi penyimpangan di tubuh MA di bawah pimpinan Hatta Ali. "Saya dengan sangat santun meminta agar Ketua, dengan semangat heroik, untuk mundur secara terhormat," ucapnya.

Gayus kemudian memberikan beberapa penyimpangan yang terjadi di masa kepemimpinan Hatta Ali. Selain kasus korupsi beberapa hakim, ternyata ada beberapa hal ini yang dianggapnya menyimpang. Di antaranya, penyebutan Ketua Kamar dan Hatta Ali yang tidak pernah bersidang.

"Ketua (Hatta Ali) menyebutkan kamar. Padahal, tidak pernah ada kamar. Adanya Ketua Muda Pidana, Ketua Muda Perdata. Sekarang Ketua Kamar, jadi ini persoalan. Kemudian, Ketua Mahkamah Agung juga tidak pernah bersidang. Sebelumnya, Ketua Mahkamah Agung bersidang. Ini ada aturannya, Undang-Undang Nomor 5/2004 Pasal 5," bebernya.

Gayus juga mengungkap bahwa di era Hatta Ali, para Hakim Agung tidak dilibatkan dalam pembuatan kebijakan MA. Bahkan, dalam enam bulan terakhir tidak ada pleno hakim.

"Kami tidak pernah dilibatkan. Kami diperlakukan seperti mesin, yang hanya bertugas memutus perkara," tandasnya. ■ NET